

## **RESPON POLANDIA TERHADAP *EUROPEAN GREEN DEAL* (EGD)**

**Oleh : Ayuda Lestika Putri**

**Pembimbing: Dr. Yessi Olivia, S.IP., M.IntRel**

Jurusan Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

### ***Abstract***

*This research explains the response of Poland, a member state of the European Union (EU), to the European Green Deal (EGD), which was introduced by the European Commission in 2019. The EGD is a climate agreement consisting of a series of initiatives aimed at making Europe the first carbon-neutral region by 2050.*

*This research is a qualitative research that uses with the rational actor model in foreign policy decision making to analyze Poland's response to the EGD. The level analysis used in this research was the state level. The data collection used in this research is a document analysis method which was reviewed through from several books, documents, journal articles, and other relevant references to Poland's response to the EGD.*

*Research shows that Poland had considered various aspects such as economics, history, geography, and social in responding to the EGD. Poland had also provided its views on the EGD at meetings of EU leaders. By considering many aspects, Poland's response to the EGD is to agree to some of the points in the EGD that are tailored to the country's conditions.*

***Keywords: Response, Poland, EU, EGD.***

## PENDAHULUAN

*European Green Deal* (EGD) pertama kali diumumkan oleh Ursula von der Leyen sebagai kandidat presiden Komisi Eropa dalam *Political Guidelines*-nya pada tahun 2019.<sup>1</sup> Dalam *Political Guidelines* tersebut, von der Leyen menyatakan bahwa EGD adalah prioritas utama dari pemerintahannya dan akan menjadi peta jalan Uni Eropa (UE) menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan sejahtera.<sup>2</sup> Ursula von der Leyen pun ditunjuk oleh negara-negara anggota UE dan dipilih oleh Parlemen Eropa sebagai pejabat terpilih sebagai Presiden Komisi Eropa pada Desember 2019. Selanjutnya, Komisi Eropa mempresentasikan EGD pada 11 Desember 2019.<sup>3</sup> *European Green Deal* (EGD) merupakan serangkaian inisiatif ambisius yang diumumkan oleh Komisi Eropa pada 11 Desember 2019 di bawah kepemimpinan Ursula von der Leyen. EGD bertujuan untuk membuat UE menjadi wilayah netral karbon pada tahun 2050 mendatang, mengurangi emisi gas rumah kaca, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan melindungi lingkungan. Sederhananya, EGD adalah sebuah rencana komprehensif untuk melindungi lingkungan dan iklim di UE. Rencana ini akan

berinvestasi dalam teknologi bersih, mendukung energi terbarukan, mengurangi polusi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan.

EGD adalah inisiatif yang inklusif dan bertujuan untuk memastikan bahwa semua negara anggota UE dapat mencapai tujuan iklimnya. Namun, salah satu negara anggota UE yaitu Polandia menolak EGD pada tahun 2019, ketika inisiatif ini dipresentasikan oleh Komisi Eropa. Penolakan Polandia terhadap EGD menjadi tantangan bagi implementasi inisiatif tersebut di kawasan UE karena Polandia merupakan produsen batu bara terbesar di UE dan menyumbang hampir 97% penambangan batu bara keras di seluruh blok.<sup>4</sup> Batu bara memainkan peran sentral dalam sistem energi dan ekonomi Polandia.<sup>5</sup> Di antara negara-negara anggota *International Energy Agency* (IEA) pada tahun 2020, Polandia memiliki pangsa batu bara tertinggi dalam produksi energi, *Total Energy Supply* (TES), *Total Final Consumption of Energy* (TFC), dan pembangkitan listrik, serta pangsa tertinggi kedua dalam produksi panas.<sup>6</sup> Pangsa batu bara yang tinggi menempatkan Polandia di urutan kedua di antara negara-negara anggota IEA untuk intensitas CO<sub>2</sub> dari pasokan energi dan keempat untuk intensitas CO<sub>2</sub> dari PDB.<sup>7</sup>

---

<sup>1</sup> Ursula von der Leyen, "A Union That Strives for More My Agenda for Europe," *European Commission*, diakses pada 26 Maret 2023, [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/speech\\_19\\_6749..](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/speech_19_6749..)

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> "A European Green Deal," *European Commission*, diakses pada 26 September 2023, [https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal\\_en](https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en).

---

<sup>4</sup> Szymon Kardaś, "From Coal to Consensus: Poland's Energy Transition and Its European Future," *European Council on Foreign Relations*, 27 September 2023, <https://ecfr.eu/publication/from-coal-to-consensus-polands-energy-transition-and-its-european-future/> diakses pada 26 November 2023.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

Maka dari itu, penolakan ini dikhawatirkan akan menghambat upaya UE untuk mencapai target netral karbon pada tahun 2050. UE pun terus membujuk Polandia untuk menyepakati EGD ini.

## KERANGKA TEORI

### *Rational Actor Model (RAM)*

*Rational Actor Model (RAM)* merupakan salah satu bentuk dari tiga model perumusan kebijakan luar negeri oleh Graham Allison dalam bukunya *The Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis*.<sup>8</sup> RAM adalah model teoritis yang digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku pemerintah nasional dalam hubungan internasional. Model ini mengasumsikan bahwa pemerintah adalah aktor yang rasional yang bertindak untuk memaksimalkan kepentingan mereka.

RAM menggunakan beberapa pertanyaan untuk membantu para analis memahami bagaimana pemerintah nasional membuat keputusan dalam hubungan internasional. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, para analis dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang motivasi pemerintah dan memprediksi bagaimana mereka akan bertindak dalam situasi tertentu. Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dalam RAM:

- a. Apa yang dianggap negara sebagai ancaman dan peluang?
- b. Apa tujuan negara?
- c. Apa opsi yang tersedia bagi negara?

---

<sup>8</sup> Graham Allison, "The Cuban Missile Crisis," 1969.

- d. Apa biaya dan manfaat dari setiap opsi?
- e. Apa pilihan terbaik negara?

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. **Pandangan Polandia terhadap *European Green Deal (EGD)***

Polandia memiliki salah satu sistem energi terbesar di UE. Sistem ini menyediakan energi bagi ekonomi Polandia yang merupakan salah satu ekonomi terbesar di UE dalam indikator makro energi utama. Polandia pun menempati peringkat ke-delapan di UE dalam hal PDB (€ 496,4 miliar dalam harga saat ini pada tahun 2018).<sup>9</sup> Industri adalah sektor yang mengkonsumsi energi paling banyak (34,5%), diikuti oleh sektor transportasi (27%) dan rumah tangga (23%).<sup>10</sup> Sektor energi Polandia menyumbang sekitar 4,5% dari PDB Polandia dan mempekerjakan sekitar 258 ribu orang.<sup>11</sup> Pada tahun 2019, pertambangan batu bara keras mempekerjakan 83,5 ribu orang, termasuk staf pabrik industri dan kantor pusat yang mendukung operasional perusahaan batu bara.<sup>12</sup>

Polandia memiliki tingkat ketergantungan impor energi yang rendah dibandingkan dengan negara-negara UE lainnya karena sebagian besar energinya berasal dari sumber

---

<sup>9</sup> "National Energy and Climate Plan for the Years 2021-2030 Objectives and Targets, and Policies and Measures," *The Ministry of Energy*, 2019, hal 6.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 7.

<sup>12</sup> Ewelina Kochanek, "Poland's Energy Transformation in the Context of the Challenges of the European Green Deal," *Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej* 20, no. 1 (2022): 79–101, diakses pada 08 Oktober 2023, <https://doi.org/10.36874/riesw.2022.1.5>.

daya domestik, seperti batu bara. Polandia pun menghadapi tantangan besar dalam mendekarbonisasi ekonominya karena memiliki sedikit sumber daya energi terbarukan, seperti sinar matahari dan angin, dan tidak memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir. Selain itu, Polandia bergantung pada impor gas alam yang dapat terganggu oleh faktor-faktor geopolitik. Maka dari itu, Polandia menjadi salah satu negara anggota UE yang paling skeptis terhadap kebijakan iklim termasuk EGD ini.

Sejak awal EGD dipresentasikan, Polandia telah menolak untuk mendukung kesepakatan tersebut. Di dalam pertemuan para petinggi negara anggota UE, Polandia akan menyetujui EGD jika UE menyetujui Polandia mencapai tenggat netralitas karbon pada 2070 bukan 2050. Komisi Eropa tidak setuju dengan perubahan kerangka waktu untuk mencapai target EGD tersebut. Polandia tidak dapat mencegah EGD untuk direalisasikan dikarenakan EGD mengandalkan suara untuk mencapai kesepakatan. Pada awalnya, Polandia didukung oleh Estonia, Hungaria, dan Republik Ceko dalam penolakan EGD. Namun, Estonia dengan cepat mendukung kesepakatan tersebut. Hungaria dan Republik Ceko juga ikut menyepakati EGD setelah diizinkan untuk menggantikan batu bara dengan energi nuklir secara besar-besaran.

Penting untuk dicatat bahwa transisi energi di Polandia tidak boleh bersifat revolusioner karena dapat membahayakan perekonomian dan keamanan energinya. Selain dikarenakan sangat bergantung pada batu bara, Polandia juga sangat

bergantung pada energi impor terutama dari Rusia. Polandia perlu mengembangkan sumber energi domestik yang berkelanjutan, seperti energi terbarukan dan efisiensi energi. Maka dari itu, Polandia meminta lebih banyak fleksibilitas dan lebih banyak dana UE untuk berhasil mentransisikan ekonominya yang sangat bergantung pada batu bara dan netralitas karbon. Lembaga Ekonomi Polandia memperkirakan bahwa UE harus mengalokasikan dana sebesar €10 – 20 Miliar setiap tahun untuk membantu negara-negara anggota yang menghadapi transisi ke ekonomi rendah karbon. Namun, beberapa politis UE mungkin enggan mengalokasikan begitu banyak dana untuk Polandia karena negara ini sudah merupakan penerima dana UE terbesar di antara semua negara anggota. Pada akhirnya, Polandia menjadi satu-satunya negara anggota UE yang secara terbuka menentang EGD.

Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Polandia pada saat itu yaitu Michał Kurtyka menekankan bahwa transformasi energi yang diperlukan untuk mencapai netralitas karbon harus adil dan mempertimbangkan titik awal dari masing-masing negara.<sup>13</sup> Hal ini menjadi fokus Polandia sebelum menerima EGD karena transformasi energi di Polandia akan membutuhkan biaya yang besar serta memakan waktu yang lama. Maka dari itu pemerintah Polandia perlu memastikan bahwa transformasi energi tidak merugikan masyarakat yang paling rentan, seperti masyarakat berpenghasilan

---

<sup>13</sup>„Green Deal i Co Dalej?“, *Serwis Rzeczypospolitej Polskiej*, diakses pada 27 September 2023, <https://www.gov.pl/web/klimat/green-deal-i-co-dalej>.

rendah dan pekerja di sektor-sektor yang bergantung pada bahan bakar fosil. Transformasi energi juga dapat menyebabkan kenaikan harga energi yang dapat berdampak negatif pada perekonomian sehingga nantinya pemerintah Polandia harus mengambil langkah-langkah untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif transformasi energi, seperti subsidi energi untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan program pelatihan untuk pekerja yang kehilangan pekerjaan karena transformasi energi.

Kurtyka menambahkan bahwa Polandia dapat memanfaatkan EGD untuk menjadi pemimpin dalam pengembangan teknologi energi terbarukan dan transportasi berkelanjutan.<sup>14</sup> Maka dari itu muncullah, dua pandangan utama tentang transformasi energi:<sup>15</sup>

1. Mengembangkan sumber dan jaringan listrik skala besar. Hal ini didukung oleh industri energi tradisional tetapi menghadapi penolakan dari masyarakat lokal dan kurangnya stimulus ekonomi,
2. Mendorong pembangkitan energi terdistribusi dari sumber yang beragam. Hal ini didukung oleh pemerintah Polandia dan dianggap sebagai solusi yang lebih berkelanjutan dan aman.

Pemerintah Polandia berkomitmen untuk mencapai netralitas iklim dan melihat transisi energi sebagai peluang untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Wakil

Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup memperkirakan bahwa transisi energi akan menciptakan 300.000 pekerjaan baru di Polandia dalam beberapa dekade mendatang.<sup>16</sup> Transisi energi juga akan mendorong pembangunan daerah dan meningkatkan daya saing ekonomi Polandia. Selain itu, transisi energi akan membuka peluang baru bagi inovasi dan teknologi baru. Perusahaan-perusahaan di sektor energi dan industri pembangkitan panas menekankan perlunya melakukan transformasi radikal industri energi Polandia dan untuk memastikan keamanan pasokan listrik dan panas selama transisi. Namun, mereka juga mengakui bahwa penerapan EGD akan menimbulkan tantangan yang signifikan bagi mereka karena kecepatan perubahan yang direncanakan. Oleh karena itu, mereka mengharapkan pemerintah untuk memberikan dukungan regulasi, keuangan, dan organisasi untuk membantu mereka beralih ke ekonomi hijau. Mereka juga menekankan perlunya transisi yang adil dan mempertimbangkan perbedaan antarnegara anggota serta memastikan bahwa semua pihak mendapatkan manfaat dari transisi.

#### **b. Keputusan Polandia terhadap *European Green Deal (EGD)***

Selama pandemi, ada perbedaan pendapat yang tajam di antara pemerintah Polandia tentang EGD. Beberapa menteri berpendapat bahwa perlu untuk menolak atau menunda pelaksanaan EGD demi

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Jerzy Menkes dan Magdalena Suska, *The Economic and Legal Impact of Covid-19: The Case of Poland, The Economic and Legal Impact of Covid-19: The Case of Poland* (New York: Routledge, 2022), <https://doi.org/10.4324/9781003144434>.

<sup>16</sup> ““Polish Recipe for the New Green Deal,”” *Website of the Republic of Poland*, <https://www.gov.pl/web/climate/polish-recipe-for-the-new-green-deal> diakses pada 27 September 2023

menyelamatkan ekonomi yang dinyatakan oleh Wakil Menteri Aset Negara tahun 2020 yaitu Janusz Kowalski, sementara menteri lainnya yaitu Menteri Lingkungan 2020, Michal Wos dan Menteri Iklim, Michal Kurtyka mendukung langkah-langkah dukungan untuk pengembangan energi terbarukan di Polandia. Meskipun ada perbedaan pendapat tersebut, Polandia menandatangani pernyataan bersama Dewan Eropa pada 26 Maret 2020 yang mendukung pengembangan ekonomi Eropa setelah pandemi sambil mengintegrasikan transisi hijau dan transformasi digital, yang menyatakan dukungan untuk EGD.<sup>17</sup> Namun, pada Juli 2020, Polandia tidak berkomitmen pada poin 2.1.1. *Increasing the EU's climate ambition for 2030 and 2050* di dalam EGD. Dalam artian, Polandia akan mencapai netralitas karbon dengan tenggatnya sendiri. Hal ini menyebabkan Polandia memiliki keterbatasan akses ke alokasi dari *Just Transition Fund* (JTF) dan hanya mendapatkan setengah dari dana tersebut.<sup>18</sup> Polandia akan menerima hingga €2 miliar tetapi Polandia hanya menerima setengah dari jumlah tersebut.

JTF adalah instrumen keuangan yang didirikan oleh UE untuk mendukung wilayah dan komunitas yang paling terpengaruh oleh transisi menuju iklim netral. JTF memainkan peran penting dalam membantu Polandia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan menciptakan lapangan kerja baru di sektor energi bersih. Namun, untuk mendapatkan dana JTF, Polandia perlu menyiapkan rencana transisi adil teritorial yang konsisten dengan

kebijakan iklim UE. Rencana tersebut harus mencakup komitmen untuk mencapai transisi nyata serta langkah-langkah yang jelas dan terukur untuk mencapai perubahan tersebut. Pemerintah Polandia pun mengeluarkan Kebijakan Energi Polandia hingga 2040 (*Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku / PEP2040*).

PEP2040 adalah kebijakan nasional Polandia untuk transisi energi ke energi rendah emisi. PEP2040 sejalan dengan kebijakan iklim dan energi UE yang bertujuan untuk mencapai netralitas iklim pada tahun 2050. PEP2040 mempertimbangkan tantangan yang dihadapi Polandia dalam melakukan transisi energi seperti ketergantungannya yang tinggi pada batu bara dan dampak pandemi COVID-19. PEP2040 bertujuan untuk menjamin keamanan energi, memastikan distribusi biaya yang adil, dan melindungi kelompok sosial yang paling rentan. PEP2040 juga akan memulai perubahan modernisasi yang lebih luas di seluruh perekonomian Polandia. PEP2040 merupakan salah satu dari sembilan strategi sektoral yang terintegrasi dengan *Strategy for Responsible Development* dan sejalan dengan *National Energy and Climate Plan 2021 – 2030*. PEP2040 dimulai dengan menjelaskan status dan kondisi sektor energi Polandia saat ini dan mengidentifikasi tiga pilar utama yang akan mendukung transisi energi Polandia yaitu:<sup>19</sup>

1. Keamanan Energi, bertujuan untuk memastikan bahwa Polandia memiliki pasokan energi yang andal dan berkelanjutan,

---

<sup>19</sup> Energy Policy of Poland until 2040, *Ministry of Climate and Environment*. Warsaw, 2021.

---

<sup>17</sup> Jerzy Menkes dan Suska, *op.cit.*, hal 116.

<sup>18</sup> *Ibid.*

2. Transisi Energi, bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Polandia pada bahan bakar fosil dan beralih ke sumber energi yang lebih bersih seperti energi terbarukan,
  3. Pasar Energi yang Kompetitif, bertujuan untuk menciptakan pasar energi yang adil dan efisien. PEP2040 menetapkan delapan tujuan khusus yang masing-masing didukung oleh langkah-langkah proyek-proyek strategis. Pendekatan teritorial juga diterapkan dalam PEP2040 dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan energi masing-masing wilayah di Polandia. Delapan tujuan khusus tersebut sebagai berikut:<sup>20</sup>
    - a. *Specific Objective 1*: Pemanfaatan optimal sumber daya energi sendiri. *Strategic project*: Transisi wilayah batu bara,
    - b. *Specific Objective 2*: Penambahan kapasitas pembangkit listrik dan infrastruktur jaringan. *Strategic project*: (2A) *Capacity market*, (2B) pelaksanaan jaringan listrik pintar,
    - c. *Specific objective 3*: Diversifikasi pasokan dan pengembangan infrastruktur jaringan untuk gas alam, minyak mentah dan bahan bakar cair. *Strategic Project*: (3A) Pembangunan pipa Baltik, (3B) Pembangunan jalur dua pipa Pomerania,
    - d. *Specific Objective 4*: Pengembangan pasar energi. *Strategic Project*: (4A) Implementasi *Action Plan* (untuk meningkatkan kapasitas transmisi listrik lintas batas), (4B) Hub gas, (4C) Pengembangan elektromobilitas,
    - e. *Specific Objective 5*: Pelaksanaan tenaga nuklir. *Strategic project 5*: *Polish Nuclear Power Programme*,
    - f. *Specific Objective 6*: Pengembangan sumber energi terbarukan. *Strategic Project*: Implementasi energi angin lepas pantai
    - g. *Specific Objective 7*: Pengembangan pemanas distriks dan kogenerasi. *Strategic Project*: Pengembangan pemanas distriks
    - h. *Specific Objective 8*: Peningkatan efisiensi energi. *Strategic Project 8*: Meningkatkan peningkatan efisiensi energi.
- PEP2040 adalah dokumen komprehensif yang didukung oleh data dan analisis yang kuat dan disertai dengan evaluasi pelaksanaan kebijakan energi sebelumnya, kesimpulan dari analisis prakiraan, dan *Strategic Environmental Assessment of PEP2040*. PEP2040 bertujuan untuk mencapai transisi energi rendah emisi di Polandia dengan cara yang adil, partisipatif, inovatif, dan berkelanjutan.<sup>21</sup> Transisi energi ini akan memberikan stimulus bagi perekonomian sambil memastikan keamanan energi dan melindungi lingkungan dan iklim. Dalam transisi energi ini, semua masyarakat Polandia harus memiliki akses ke energi yang terjangkau dan berkualitas terlepas dari pendapatan atau lokasi tempat tinggal. Transisi energi ini harus melibatkan masyarakat setempat dimana seluruh masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam transisi energi dan memberikan masukan mereka. Dalam proses transisi energi ini, Polandia akan berinvestasi dalam teknologi energi baru dan terbarukan

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan efisiensi energi. Terakhir, transisi energi ini akan dilakukan dengan cara melindungi lingkungan dan iklim dimana Polandia akan mengurangi ketergantungannya pada bahan bakar fosil dan beralih ke sumber energi yang lebih bersih.

Pemerintah Polandia telah mengusulkan perubahan pada dokumen PEP2040 sehingga memicu protes dari serikat pekerja pertambangan karena khawatir akan menyebabkan penutupan tambang batu bara pada tahun 2036 - 2037. Serikat pekerja juga memperingatkan bahwa penutupan tambang akan memiliki dampak sosial-ekonomi yang buruk dan menuntut agar masa transisi diperpanjang menjadi sekitar 40 tahun. Pemerintah dan serikat pekerja telah mencapai kesepakatan bahwa penambangan batu bara di Polandia akan berakhir pada tahun 2049. Untuk memfasilitasi transformasi, pemerintah mempertimbangkan untuk mentransfer semua pembangkit listrik tenaga batu bara ke satu perusahaan hingga penutupan terakhirnya. Hal ini bertujuan untuk membantu perusahaan energi lain mendapatkan dana untuk pengembangan energi terbarukan. Namun, sejauh ini belum ada jadwal konkret untuk mencapai tujuan ini dan Komisi Eropa juga belum menyetujui solusi tersebut. Sampai sekarang, belum ada pernyataan Polandia yang menyatakan untuk berkomitmen mencapai netralitas karbon pada tahun 2050 karena pemerintah Polandia menganggap komitmen tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi Polandia yang masih sangat bergantung pada batu bara

untuk memenuhi kebutuhan energinya.

## **KESIMPULAN**

Polandia adalah salah satu negara anggota dari UE yang merupakan produsen batu bara terbesar di dunia. Batu bara memainkan peran penting dalam perekonomian Polandia dan merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Sebagai negara anggota UE, Polandia memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan dan kebijakan UE. Pada akhirnya, Polandia menerima kesepakatan itu tetapi tidak berkomitmen untuk mencapai netralitas pada tahun 2050 yang akan datang. Keputusan yang diambil oleh pemerintah Polandia mempertimbangkan kondisi historis yang mana pemerintah telah mendukung konsumsi batu bara selama bertahun-tahun, sehingga industri energi Polandia masih sangat terpusat dan tidak efisien. Polandia pun akan mengeluarkan banyak dana untuk beralih ke transisi hijau.

Pemerintah juga mengambil keputusan tersebut dikarenakan mempertimbangkan tingkat pengangguran. Jika pemerintah menyepakati komitmen netralitas iklim tersebut maka mayoritas dari masyarakat Polandia yang mengandalkan sektor industri batu bara sebagai pekerjaan mereka akan kehilangan pekerjaan secara massal dan terjadilah pengangguran skala besar nantinya. Beberapa hal tersebut lah yang telah membuat Polandia rentan terhadap peraturan iklim UE, terkhususnya netralitas karbon pada 2050.

Tidak hanya itu, keterbatasan sumber daya energi terbarukan,

seperti sinar matahari dan angin, dan tidak memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir serta bergantung pada impor gas alam juga menjadi faktor pertimbangan pemerintah Polandia. Maka dari itulah, Polandia memilih untuk tidak berkomitmen pada target netralitas karbon 2050 di dalam EGD dikarenakan Polandia tidak yakin dapat mencapainya. Polandia akan mencapai netralitas karbon dengan kecepatannya sendiri dan paling cepat akan terwujud pada tahun 2070. Keputusan Polandia ini pun cukup menguntungkan bagi Polandia. Meskipun Polandia tidak berkomitmen pada poin utama dari EGD tersebut, yaitu netralitas karbon 2050, Polandia tetap menerima dana bantuan dari UE yaitu JTF, walaupun hanya menerima setengah dari dana yang seharusnya ia dapat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Artikel Jurnal

Kochanek, Ewelina. "Poland's Energy Transformation in the Context of the Challenges of the European Green Deal." *Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej* 20, no. 1 (2022): 79–101.  
<https://doi.org/10.36874/riesw.2022.1.5>.

Menkes, Jerzy, and Magdalena Suska. *The Economic and Legal Impact of Covid-19: The Case of Poland. The Economic and Legal Impact of Covid-19: The Case of Poland*. New York: Routledge, 2022.  
<https://doi.org/10.4324/9781003144434>.

### Buku

Allison, Graham. *The Cuban Missile Crisis*, 1969.

### Dokumen

Ministry of Climate and Environment. "Energy Policy of Poland until 2040." Warsaw, 2021.

The Ministry of Energy. "National Energy and Climate Plan for the Years 2021-2030 Objectives and Targets, and Policies and Measures,". 2019.

### Website

European Commission. "A European Green Deal." diakses pada 26 September 2023.  
[https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal\\_en](https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en).

European Council on Foreign Relations. Szymon Kardaś. "From Coal to Consensus: Poland's Energy Transition and Its European Future." 2023. diakses pada 26 November 2023.  
<https://ecfr.eu/publication/from-coal-to-consensus-polands-energy-transition-and-its-european-future/>.

IEA. "Poland 2022 Executive Summary." diakses pada 26 November 2023.  
<https://www.iea.org/reports/poland-2022/executive-summary>.

Leyen, Ursula von der. "A Union That Strives for More My

Agenda for Europe.” *European Commission*, diakses pada 26 Maret 2023.  
[https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/speech\\_19\\_6749](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/speech_19_6749).

*Serwis Rzeczypospolitej Polskiej*.  
“„Green Deal i Co Dalej?””.  
diakses pada 27 September 2023.

<https://www.gov.pl/web/klimat/green-deal-i-co-dalej>.

Website of the Republic of Poland.  
“Polish Recipe for the New Green Deal.”” diakses pada 27 September 2023.

<https://www.gov.pl/web/climate/polish-recipe-for-the-new-green-deal>.